

DAFTAR ISI

	hlm
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	23
3. Tahap Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Alat Pengumpulan Data	25
6. Analisa Data	25
7. Lokasi Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KONSEP TEORI NEGARA HUKUM DAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945, LEMBAGA NEGARA DALAM KONSEP TRIAS POLITICA, LEMBAGA NEGARA	

**INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

A. Perkembangan teori Negara Hukum	29
B. Lembaga Negara menurut UUD 1945	34
C. Lembaga Negara menurut konsep trias politica	43
D. Lembaga Bantu Di Indonesia	45

BAB III KOMISI PENYIARAN DI INDONESIA DAN DI NEGARA LAIN

A. Komisi Penyiaran Di Amerika (<i>Federal Communication Commision</i>)	51
B. Komisi Penyiaran Di Inggris	53
C. Komisi Penyiaran Di Australia	56
D. Komisi Penyiaran Di Perancis (<i>Conseil Superieur Del'Audiovisuel</i>)	57
E. Komisi Penyiaran Di Indonesia	58

**BAB IV KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA
NEGARA BANTU BERDASRKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

A. Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	
1. Idependensi	64
2. Check an Balances KPI Terhadap cabang Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia	68
a. Check and Balances KPI Terhadap Cabang Kekuasaan Eksekutif.....	70
b. Check and Balances KPI Terhadap Cabang Kekuasaan Legislatif	71
c. Check and Balances KPI Terhadap Cabang Kekuasaan Yudikatif	72

3. KPI Ditinjau Menurut Fungsi Kelembagaan	73
B. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu Yang Independen Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	
1. Wewenang KPI Dalam Penyelenggaraan Penyiaran	
Di Indonesia	75
a. Menetapkan Standar Program Siaran	75
b. Menyusun Peraturan dan Menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.....	76
c. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran standar Program Siaran.....	77
2. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia	78
a. Menjamin Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Layak dan Benar Sesuai dengan Hak Asasi Manusia	78
b. Ikut Membantu Pengaturan Infrastruktur Bidang Penyiaran	78
c. Ikut Membangun Iklim Persaingan yang Sehat Antar Lembaga Penyiaran dan Industri Terkait.....	79
d. Memelihara Tatanan Informasi Nasional yang Adil, Merata, dan Seimbang	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN